The Customary Settlement of *Khalwat* Offenses in Seumadam Village, Aceh Tamiang: An Analysis of Qanun No. 6 of 2014 on *Jinayah*

¹M. Abdiansyah

Institut Agama Islam Negeri Langsa
m.abdiansyah26@gmail.com

Anizar

Institut Agama Islam Negeri Langsa
anizar@iainlangsa.ac.id

Rosmiati

Institut Agama Islam Negeri Langsa
rosmiati@iainlangsa.ac.id

Abstract

This study examines the application of customary law in the settlement of khalwat offenses in Seumadam Village, Aceh Tamiang District, and assesses its compatibility with Qanun Aceh Number 6 of 2014 on Jinayah Law. The research uses a juridical-empirical approach with a case study method, through observation, interviews, and documentation. The findings show that the settlement of khalwat offenses is carried out through customary mechanisms involving deliberation and dialogue among the parties involved. Sanctions imposed typically include compensation, a public apology, or other forms of punishment in line with local customary values. If a resolution is not reached, the case may be referred to the Sharia Court for formal legal processing. Qanun Number 6 of 2014 provides more stringent sanctions such as whipping, fines, or imprisonment. However, this qanun also recognizes the role of customary law as outlined in Qanun Aceh Number 9 of 2008 on the Development of Customary Life and Traditions. Although the customary settlement mechanism aligns with the spirit of the qanun, which emphasizes peaceful resolution, its implementation is considered weak in providing a deterrent effect. This opens the potential for abuse as a means of "cheap marriage," harms women, and creates social injustice.

Keyword: Custom, Khalwat Crime, Qanun

¹ Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum adat dalam penyelesaian *jarimah khalwat* di Desa Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang, serta meninjau kesesuaiannya dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis studi kasus, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian *jarimah khalwat* dilakukan secara adat melalui mekanisme musyawarah dan dialog antar pihak yang terlibat. Sanksi yang dijatuhkan umumnya berupa ganti rugi, permintaan maaf terbuka, atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan nilai-nilai adat setempat. Jika penyelesaian tidak tercapai, maka kasus dapat dilimpahkan ke Mahkamah Syariah untuk penanganan secara hukum formal. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengatur sanksi lebih tegas seperti hukuman cambuk, denda, atau penjara. Namun, qanun tersebut tetap mengakui peran hukum adat sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Meskipun mekanisme adat sejalan dengan semangat qanun yang mengedepankan penyelesaian damai, penerapannya dinilai lemah dalam memberikan efek jera. Hal ini membuka potensi penyalahgunaan sebagai sarana “menikah murah”, merugikan perempuan, dan menimbulkan ketidakadilan sosial.

Kata Kunci: Adat, *Jarimah Khalwat*, Qanun

Pendahuluan

Islam dengan tegas melarang melakukan zina sementara *khalwat*/mesum merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina.² Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka *khalwat* (mesum) juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘*uqubat ta’zir*.³ *Khalwat* dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina yakni hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah. *Khalwat* merupakan salah satu perbuatan pidana atau delik (*jarimah*) yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*. Dalam Qanun *Jinayah* ini, unsur utama *khalwat* adalah dengan sengaja berkhalwat; menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan.

² Satiya Citra Dewi and Hasanuddin Yusuf Adan, “The Effectiveness of Adat Sanction for Khalwat Offense Based on Islamic Criminal Law in Ketol, Central Aceh [Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat: Perspektif Hukum Pidana Islam di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah],” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (December 26, 2021): 217–37, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11341>.

³ Muhadi Khalidi and Arifin Abdullah, “Dayah dan Rehabilitasi Akhlak Pelaku Jarimah: Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (August 16, 2022): 65–77, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.12762>.

Terkait tema dalam penelitian ini maka hukuman bagi pelaku *khalwat* jika ditinjau dari Qanun *jinayah* No 6 tahun 2014 pada BAB IV Pasal 23 ayat (1-2) dijelaskan bahwa: “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pada Pasal 24, *jarimah khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diatur untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh mengenai pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Penyelesaian ini dilakukan dengan merujuk pada aturan yang berlaku dalam hukum adat setempat, yang mencakup musyawarah dan keputusan berdasarkan norma-norma tradisional. Selain itu, jika diperlukan, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang adat istiadat juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam konteks *jarimah khalwat*. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian *jarimah khalwat* tidak hanya bergantung pada hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dan tradisi yang ada dalam masyarakat Aceh, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan dalam komunitas adat tersebut.

Hukum adat merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.⁴ Pelaksanaan hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta dan rasa manusia, yang artinya adalah bahwa hukum adat tumbuh berkembang mengikuti pola pikir dan pola hidup yang hidup dalam masyarakat.⁵ Hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.

Sebagai masyarakat Aceh, adat ibarat *meukoh reubong* (bagai memotong rebung), maksudnya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Berbeda halnya dengan *hukom* (hukum) yang aturannya ketat dan tidak boleh dilanggar semena-mena. Kebolehan menyesuaikan bahkan meninggalkan adat dengan resiko *tabeue* (hambar) tetapi tidak boleh meninggalkan *hukom*. Masyarakat Aceh sebagai umat Islam, amat kuat memegang kepribadian aqidah Islam dalam kehidupan, sebagai asas pokok dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶ Wawasan adat di dalam masyarakat Aceh sungguh amat sejalan dengan perkembangan watak etnik Aceh dimana aspek kultural, ideologi dan struktural bersenyawa dengan adat dan agama Islam. Dimana satu sama lain sulit

⁴ Rasimin Rasimin et al., “Literature Review: Mengimplementasikan Nilai-Nilai Seloko Adat Kota Jambi Pada Proses Konseling,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (June 12, 2023): 10451–60.

⁵ Zahra Dwi Andini and Usiono Usiono, “Systematic Literature Review: Pembudayaan Pancasila Di Kalangan Masyarakat,” *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (December 1, 2023): 623–28, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1412>.

⁶ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, 1st ed. (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 2014). h. 22

dipisahkan. Bagi masyarakat Aceh, agama dengan adat, *Lagei Dzat Ngon Sifuet* (seperti zat dengan sifat) artinya antara adat dengan peraturan agama tidak dapat dipisahkan. Adat bersumber dari syarak dan syarak bersumber dari *Kitabullah* (Kitab Allah). Karena itu adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Aceh tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Hukum adat di masyarakat Aceh telah lama menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan berbagai sengketa, yang umumnya diselesaikan melalui proses musyawarah dan mufakat dalam lembaga-lembaga adat, seperti peradilan desa atau yang dikenal sebagai peradilan adat. Peran hakim perdamaian di tingkat desa atau kampung memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk menampung kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan hukum yang lebih progresif. Biasanya, tokoh adat dan pemuka agama berperan sebagai hakim dalam lembaga tersebut. Kewenangan hakim adat ini tidak hanya terbatas pada urusan perdamaian, tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa di berbagai bidang hukum tanpa membedakan antara hukum pidana, perdata, hukum publik, maupun lainnya.

Penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat Aceh banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Adat. Lembaga adat ini bisa diwujudkan melalui pengejawantahan pranata sosial sebagai *pageu Gampong* (pagar kampung). Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup masyarakat, bukan untuk memutuskan kalah atau menang. Bahkan pada kasus-kasus tertentu seperti kasus *khalwat* sebagian masyarakat Aceh meletakkan posisi lembaga adat lebih tinggi tingkatannya dibandingkan lembaga pengadilan formal.

Keberadaan peradilan adat di Aceh diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah. Bahkan Keputusan bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat *Gampong* dan *Mukim* atau nama lain di Aceh, pada bagian kesatu menyebutkan secara tegas sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat *Gampong* dan *Mukim* yang bersifat ringan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat atau lembaga adat. Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat sebagaimana juga telah diamanatkan pada Pasal 13 ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat.

Bagi masyarakat Desa Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang, mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik sosial dilakukan melalui institusi adat yang dikenal dengan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang. Lembaga ini merupakan entitas adat yang secara formal dibentuk untuk menjalankan fungsi strategis dalam melakukan pengkajian, pengembangan, dan pelestarian nilai-nilai adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Tamiang. MAA berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sistem sosial berbasis kearifan lokal serta menjadi bagian integral dari struktur sosial-budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan kasus yang ditemukan di lapangan, penyelesaian *jarimah khalwat* melalui adat cenderung bersifat subjektif dan bergantung pada kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Tidak ada standar sanksi yang jelas, sehingga hukuman yang diberikan dapat berbeda-beda tergantung pada individu yang terlibat. Beberapa pelaku hanya dikenakan denda berupa uang atau materi lainnya, sementara yang lain bisa mendapatkan hukuman sosial seperti pengucilan dari masyarakat. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakadilan, karena tidak semua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Berbeda halnya jika penyelesaian dilakukan berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang *Jinayah*, di mana sanksi terhadap pelaku *jarimah khalwat* sudah diatur secara jelas dan berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian.

Penerapan hukum adat dalam penyelesaian *jarimah khalwat* juga memiliki kelemahan dari segi efek jera karena hukuman yang diberikan cenderung lebih ringan dan bersifat kompromi, hal ini dapat memberikan ruang bagi individu lain untuk melakukan pelanggaran serupa tanpa rasa takut terhadap konsekuensi yang jelas. Dalam qanun, ketentuan mengenai *jarimah khalwat* sudah memiliki batasan hukuman yang tegas, sehingga setiap individu yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan konsekuensi yang sama tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus. Dengan demikian, penerapan qanun memberikan kepastian hukum dan efek jera yang lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme hukum adat yang masih dipraktikkan di Desa Seumadam.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui proses penyelesaian *jarimah khalwat* secara Adat di Desa Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk mengetahui tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* Terhadap Penyelesaian *jarimah Khalwat* secara Adat di Desa Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang *jarimah khalwat* atau sanksi hukum terhadap pelaku *khalwat* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Abdul Khalib dan Mukhlis dalam penelitian yang berjudul "*Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane)*," telah mengulas dengan sangat terperinci tentang dinamika penanganan kasus *jarimah khalwat* yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, terutama terkait belum dieksekusinya sejumlah pelaku karena keterbatasan anggaran dan masih dominannya penyelesaian secara adat oleh Satpol PP/WH.⁷ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks penggunaan pendekatan adat dalam penyelesaian kasus *khalwat* di wilayah Aceh. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek hambatan pelaksanaan hukum *jinayah* dari sisi institusi penegak hukum dan anggaran di Aceh Tenggara, penulis fokus pada aspek efektivitas penyelesaian secara adat dalam menciptakan keadilan dan efek jera di Desa Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang.

Satiya Citra Dewi dan Hasanuddin Yusuf Adan dalam tulisan yang berjudul "*Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Sanksi Adat di Kecamatan Ketol*,

⁷ Abdul Khalib and Mukhlis Mukhlis, "Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 1 (February 17, 2020): 1-16.

Kabupaten Aceh Tengah” telah mendeskripsikan secara mendalam mengenai bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku khalwat, efektivitas dari sanksi tersebut dalam memberantas jarimah khalwat, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian tersebut.⁸ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks penanganan kasus khalwat secara adat yang mengedepankan musyawarah dan keputusan kolektif berbasis nilai lokal. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada efektivitas ekonomi dari sanksi adat serta validitasnya dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Ketol, penulis fokus pada dinamika penerapan hukum adat dan kesesuaiannya dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam konteks masyarakat Desa Seumadam, Aceh Tamiang.

Achmad Surya dan Suhartini tulisan yang berjudul *“Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah”* telah memaparkan secara sistematis terkait tingkat efektivitas lembaga adat sarak opat dalam menangani tindak pidana ringan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.⁹ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara di tingkat masyarakat, khususnya dalam upaya penegakan hukum berbasis kearifan lokal. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada hambatan kelembagaan dan preferensi masyarakat terhadap aparat negara dibanding lembaga adat, penulis fokus pada dinamika pelaksanaan penyelesaian jarimah khalwat melalui lembaga adat di Desa Seumadam, serta kesesuaiannya dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Ketiga karya yang telah dipaparkan di atas merupakan publikasi yang paling dekat dan linear dengan kajian yang penulis lakukan, karena sama-sama membahas praktik penyelesaian perkara melalui jalur adat, khususnya dalam konteks jarimah khalwat di wilayah hukum Provinsi Aceh. Meskipun karya di atas memiliki kemiripan dengan kajian penulis, namun penelitian ini tetap memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus menelaah efektivitas penyelesaian kasus khalwat secara adat di Desa Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, hal yang belum disentuh secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, posisi penelitian ini menjadi penting sebagai pelengkap kekayaan studi-studi sebelumnya, sekaligus menawarkan kontribusi baru (*novelty*) dalam penguatan sistem hukum berbasis adat yang selaras dengan aturan formal syariat di Aceh.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian dilakukan pada bulan November 2024 di Desa Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik penyelesaian kasus khalwat

⁸ Dewi and Adan, “The Effectiveness of Adat Sanction for Khalwat Offense Based on Islamic Criminal Law in Ketol, Central Aceh [Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat.”

⁹ Achmad Surya and Suhartini Suhartini, “Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (April 24, 2019): 91–112, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5>.

melalui jalur adat serta efektivitas dan kesesuaiannya dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara, seperti *Datok Penghulu* (selaku hakim adat), *Imeum Kampung* (sebagai penasihat adat), dan Kepala Dusun. Sementara itu, data sekunder mencakup regulasi seperti Qanun Aceh terkait Hukum Jinayat, pembinaan kehidupan adat, serta literatur berupa buku-buku ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam pengolahan data, peneliti terlebih dahulu melakukan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk memperoleh data mentah dari lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan utama: pertama, reduksi data untuk menyaring informasi penting dan relevan; kedua, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman hubungan antar-temuan; dan ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari hasil analisis. Proses ini memastikan bahwa data yang semula bersifat mentah dapat diolah secara sistematis menjadi draf akhir tulisan ilmiah yang siap untuk dipublikasikan, dengan mempertimbangkan keutuhan konteks sosial, hukum, dan budaya yang menjadi objek kajian.

Proses Penyelesaian *Jarimah Khalwat* Secara Adat di Desa Seumadam Kabupaten Aceh Tamiang

Jarimah khalwat merupakan pelanggaran syariat Islam yang terjadi ketika laki-laki dan perempuan non-mahram berduaan di tempat sepi, berpotensi menimbulkan fitnah atau zina.¹⁰ Di Aceh, yang menerapkan hukum Islam, pelanggaran ini mendapat perhatian khusus. Selain aspek hukum, *khalwat* juga berdampak sosial, seperti munculnya gosip dan rasa malu yang mencoreng nama baik pelaku dan keluarganya, serta menimbulkan stigma dan konflik sosial. Penanganan kasus *khalwat* tidak hanya dipandang dari perspektif hukum atau agama, melainkan juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat. Pendekatan komprehensif menjadi kunci penyelesaian yang bijak.

Terdapat perbedaan antara *khalwat* dan zina dalam konteks Islam, baik dari segi definisi, dampak, maupun penanganannya. *Khalwat* adalah situasi di mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada di tempat sepi atau tertutup tanpa kehadiran pihak lain, yang dapat menimbulkan potensi terjadinya perbuatan dosa.¹¹ *Khalwat* berfokus pada keadaan yang membuka peluang bagi seseorang untuk tergoda melakukan perbuatan yang melanggar syariat. *Khalwat* dianggap sebagai pintu awal yang mengarah pada dosa besar, seperti zina, yang merupakan tindakan fisik berupa hubungan seksual di luar ikatan pernikahan.

Khalwat bersifat preventif, yaitu mencegah perilaku yang lebih berat dengan menangani situasi yang berpotensi menimbulkan dosa. Sebaliknya, zina adalah pelanggaran lebih berat karena melibatkan tindakan fisik yang dilarang

¹⁰ Mustafa et al., "Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat Di Aceh Tamiang," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (January 9, 2023): 52–64.

¹¹ Irfan Irfan, "Khalwat Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 21, 2020): 112–21, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14293>.

keras dalam Islam. Dalam syariat, zina dikenai hukuman tegas karena dampaknya yang merusak, baik terhadap pelaku, keluarga, maupun tatanan sosial. Sementara itu, *khalwat* cenderung dikenai sanksi lebih ringan, karena berfokus pada tindakan pencegahan untuk menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam perspektif Islam, *khalwat* dipandang sebagai awal dari perbuatan zina, karena situasi menyendiri antara laki-laki dan perempuan non-mahram membuka peluang terjadinya godaan dan fitnah. Syariat Islam menekankan pentingnya menjaga batas interaksi guna melindungi individu dari dosa serta menjaga kehormatan masyarakat. Larangan terhadap *khalwat* bersifat preventif, bertujuan mencegah kerusakan moral sebelum mencapai tahap pelanggaran lebih serius seperti zina. Sanksi terhadap *khalwat* bersifat edukatif, agar pelaku menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya. Sebaliknya, sanksi zina lebih berat karena pelanggarannya dinilai merusak tatanan sosial dan agama secara langsung.

Salah satu keunggulan mekanisme adat adalah kemampuannya untuk memberikan solusi. Dalam musyawarah adat, para tokoh adat memberi kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Proses ini tidak hanya menanamkan rasa keadilan, tetapi juga memberikan pelajaran moral mendalam kepada pelaku dan masyarakat luas. Sanksi yang diberikan, seperti denda, permintaan maaf terbuka, atau pernikahan jika disetujui oleh kedua belah pihak, dirancang untuk mengembalikan keseimbangan sosial tanpa menimbulkan stigma atau dampak negatif jangka panjang bagi pelaku maupun korban. Hal ini penting dalam konteks masyarakat desa, di mana keharmonisan sosial dan nama baik keluarga sangat dijunjung tinggi.

Mekanisme penyelesaian secara adat memiliki peran penting dalam meredakan potensi konflik sosial, khususnya dalam kasus sensitif seperti *jarimah khalwat*. Melalui pendekatan musyawarah internal, masyarakat dapat menjaga kerahasiaan kasus, menghindari eskalasi konflik, serta melindungi martabat keluarga dan komunitas.¹² Proses ini juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap penyebaran fitnah atau stigma sosial. Walau demikian, mekanisme adat memiliki keterbatasan, terutama dalam menangani kasus yang kompleks atau mengandung unsur kekerasan, sehingga membutuhkan intervensi hukum formal demi menjamin keadilan.

Dalam kasus *khalwat* yang terjadi di Desa Seumadam, masyarakat menunjukkan kepekaan tinggi terhadap pelanggaran norma agama dan sosial. Kasus yang terjadi pada pukul 02.00 WIB melibatkan seorang pria dan wanita yang bukan mahram berada di dalam kamar terkunci tanpa busana. Hal ini memicu persepsi masyarakat bahwa tindakan tersebut merupakan zina. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, kasus tersebut dikategorikan sebagai *khalwat* karena tidak ditemukan bukti bahwa hubungan badan telah terjadi.

Keputusan untuk mengategorikan peristiwa tersebut sebagai *khalwat* menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menginterpretasikan fakta dan menghindari penghakiman tanpa bukti kuat. *Khalwat*, yang didefinisikan sebagai keadaan berduaan di tempat tertutup antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sering kali dipandang sebagai pintu menuju zina. Namun, tidak semua

¹² Mohammad Abdul Al Halib and Lina Pusvisasari, "Harmony of Islam and Local Traditions in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Era of Modernization," *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization* 1, no. 1 (April 2, 2025): 20–28, <https://doi.org/10.61166/alwadhih.v1i1.4>.

situasi *khalwat* dapat otomatis disamakan dengan zina, sebagaimana terlihat dalam kasus ini. Proses verifikasi melalui mekanisme adat membantu masyarakat untuk tidak tergesa-gesa dalam menuduh seseorang melakukan perbuatan zina, yang memiliki dampak hukum dan sosial lebih berat.

Dalam beberapa kasus *khalwat* di Desa Seumadam, penyelesaian dilakukan melalui keputusan adat yang berujung pada pernikahan pasangan pelaku. Langkah ini mencerminkan ketegasan sanksi adat sekaligus menjadi strategi untuk menutup aib yang berpotensi mencemarkan nama baik keluarga dan komunitas. Pilihan masyarakat untuk menyelesaikan perkara di tingkat lokal sebelum melibatkan Mahkamah Syariah menunjukkan kepercayaan terhadap mekanisme adat sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial. Musyawarah adat memungkinkan penilaian adil berdasarkan norma agama dan tradisi lokal, serta memperkuat peran tokoh masyarakat dalam penegakan nilai-nilai kolektif.

Kasus ini juga memperlihatkan perbedaan cara pandang masyarakat terhadap *khalwat* dan zina. Ketika masyarakat menemukan seseorang dalam situasi yang dianggap mencurigakan, sering muncul anggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan zina, terutama jika keadaan seperti tidak memakai busana terlibat. Padahal, dalam pandangan syariat Islam, zina hanya dapat dikategorikan jika terdapat bukti kuat, seperti pengakuan pelaku atau empat saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut.¹³ Ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menganggapnya sebagai zina karena situasi yang ada, tetap tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai tindakan tersebut sebagai zina, melainkan hanya bisa disebut sebagai *khalwat*.

Kasus ini juga menunjukkan bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan sosial dapat membantu menjaga norma-norma syariat Islam. Keterlibatan lima orang laki-laki sebagai saksi dalam menciduk pasangan tersebut mencerminkan tingkat perhatian masyarakat terhadap pelanggaran moral. Terlepas dari niat baik dalam menjaga moralitas, sangat penting untuk diingat bahwa tindakan masyarakat dalam menangani kasus ini harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti tidak melanggar privasi secara berlebihan atau menghakimi tanpa bukti yang cukup.

Selain itu, penyelesaian *jarimah khalwat* di Desa Seumadam tidak selalu dilakukan melalui mekanisme adat, melainkan ada juga yang diserahkan ke Mahkamah Syariah. Keputusan untuk membawa kasus ke ranah hukum formal bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterlibatan individu yang bukan warga desa, tingkat pelanggaran yang dianggap lebih berat, atau ketidaksepakatan dalam penyelesaian secara adat. Dalam hal ini, kasus *khalwat* yang melibatkan orang luar desa diperlakukan secara berbeda, dengan mengutamakan jalur hukum dibandingkan penyelesaian berbasis musyawarah desa.

Apabila kasus *jarimah khalwat* diajukan ke Mahkamah Syariah, proses penyelesaiannya tidak lagi didasarkan pada musyawarah adat, melainkan mengikuti ketentuan hukum formal yang berlaku dalam sistem peradilan syariah. Proses persidangan mencakup pemeriksaan bukti dan saksi, serta pemberian

¹³ Maulida Afriani and Muhammad Nur Muhammad Nur, "Penerapan Sanksi Adat terhadap Perkara Khalwat di Tingkat Gampong (Studi Penelitian di Blang Pulo Kota Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19253>.

kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan. Ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Syariah berfungsi sebagai lembaga yang mengedepankan prosedur hukum yang lebih terstruktur dan formal, berbeda dengan musyawarah adat yang lebih fleksibel dan mengedepankan musyawarah.

Selain hukuman cambuk, terdapat kemungkinan hukuman lain seperti denda atau kurungan tergantung pada tingkat pelanggaran dan keputusan hakim. Dalam beberapa kasus, denda dapat dikenakan sebagai bentuk ganti rugi moral atau material kepada pihak yang dirugikan, misalnya kepada keluarga atau pasangan sah dari pelaku khalwat.¹⁴ Ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Syariah tidak hanya memberi hukuman fisik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh kompensasi, baik secara materiil maupun moral.

Tradisi penyelesaian masalah melalui mekanisme adat di Desa Seumadam mencerminkan kearifan lokal yang berfungsi sebagai instrumen sosial yang efektif dalam merespons isu-isu keagamaan dan sosial. Proses ini biasanya diawali dengan laporan masyarakat kepada kepala dusun, yang menunjukkan tingginya kepercayaan warga terhadap pemimpin lokal sebagai penengah konflik. Dalam sistem adat ini, kepala dusun bersama dengan tokoh adat dan tokoh agama berperan dalam menentukan solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Mekanisme adat yang digunakan di Desa Seumadam memiliki potensi besar dalam menjaga keharmonisan sosial. Penyelesaian secara damai ini dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut, baik dalam hubungan antarwarga maupun hubungan antar keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa penyelesaian melalui adat harus tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum syariat Islam, agar tidak terjadi perbedaan pandangan atau ketidakadilan dalam memberikan hukuman atau sanksi.

Tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap Penyelesaian *Jarimah Khalwat* Secara Adat di Desa Seumadam Kabupaten Aceh Tamiang

Tinjauan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dalam penyelesaian *jarimah khalwat* secara adat di Desa Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang, memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap dua hal utama. Pertama, landasan hukum syariah yang terdapat dalam qanun tersebut, dan kedua, pengaruh adat yang berlaku di masyarakat Aceh, khususnya di desa tersebut. Qanun No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang hukum jinayah di Aceh, yang mencakup ketentuan mengenai tindak pidana syariah, salah satunya adalah *jarimah khalwat*. *Jarimah khalwat* merujuk pada tindakan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat yang sepi tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.

Pasal 23 Qanun No. 6 Tahun 2014 mengatur sanksi bagi individu yang terlibat dalam *jarimah khalwat*. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang sengaja melakukan *jarimah khalwat* diancam dengan *uqubat ta'zir* berupa cambuk

¹⁴ Lisa Hayati, Husamuddin Mz, and Sumardi Efendi, "Sanksi Adat Terhadap Jarimah Khalwat Perspektif Fikih Jinayah: Studi Di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (June 28, 2024): 151–65, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.107>.

paling banyak 10 kali, denda paling banyak 100 gram emas murni, atau penjara paling lama 10 bulan. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pihak yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan *jarimah khalwat* diancam dengan *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling banyak 15 kali, denda paling banyak 150 gram emas murni, atau penjara paling lama 15 bulan.

Analisis terhadap ketentuan ini mengungkapkan dimensi hukum syariah yang mendasari sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi cambuk yang tercantum dalam pasal ini memiliki karakteristik khas dalam penerapan hukum syariah. Cambuk sebagai hukuman fisik tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memberi pelajaran sosial bahwa pelanggaran terhadap norma agama akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berat.¹⁵ Denda emas murni juga menunjukkan adanya upaya untuk menanggukkan pelaku dari manfaat material yang dapat diperoleh dalam kehidupannya.¹⁶ Selain itu, hukuman penjara menunjukkan bahwa pelaku tidak dapat menghindari hukuman dengan cara pembayaran denda, dan adanya upaya rehabilitasi bagi pelanggar.¹⁷

Pada pasal (2), sanksi yang lebih berat diterapkan kepada individu yang berperan aktif dalam menyelenggarakan atau mempromosikan *jarimah khalwat*. Ancaman hukuman berupa cambuk paling banyak 15 kali, denda paling banyak 150 gram emas murni, atau penjara paling lama 15 bulan menunjukkan bahwa hukum syariah tidak hanya melihat pelanggaran secara individu, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan oleh orang yang turut serta dalam memfasilitasi atau mempromosikan perbuatan yang dianggap melanggar moralitas. Sanksi lebih berat ini bertujuan memberi efek jera yang lebih besar terhadap individu yang terlibat dalam *jarimah khalwat*, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang menyebarkan perilaku tersebut di masyarakat.

Namun demikian, qanun ini juga mengatur bahwa *jarimah khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat dapat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat. Pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelesaian *jarimah khalwat* dapat dilakukan oleh lembaga adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat Aceh, yang sangat memegang nilai-nilai adat, sering kali lebih mempercayakan penyelesaian masalah sosial kepada lembaga adat yang lebih mengenal dinamika lokal, dengan tujuan untuk menjaga kedamaian dan hubungan baik antarwarga.

Ketentuan ini membawa tantangan dalam konsistensi penegakan hukum. Ada potensi ketidaksesuaian antara keputusan yang diambil oleh peradilan adat dengan hukuman yang diatur dalam qanun, yang mungkin tidak seberat yang diharapkan oleh sistem hukum formal. Misalnya, peradilan adat lebih cenderung memberikan sanksi sosial atau penyelesaian melalui musyawarah, seperti

¹⁵ Hardi Syah Hendra and Nina Nursari, "Pemberlakuan Hukuman Cambuk Dalam Konsep Pemidanaan Sebagai Bagian Dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2024): 47–61, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.817>.

¹⁶ Desy Purwita Sari, Rofikah Rofikah, and Luthfiah Trini Hastuti, "Denda Emas Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 6, no. 2 (April 22, 2021): 1–25, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v6i2.50526>.

¹⁷ Muhammad Arifin, "Tindak Pidana Terhadap Pelaku Khalwat Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 14 Tahun 2003," *Jurnal Al-Fikrah* 4, no. 1 (June 30, 2015): 6–36.

memberi nasehat atau melakukan pembinaan. Sementara itu, dalam qanun, sanksi berupa cambuk, denda, atau hukuman penjara lebih tegas dan bertujuan untuk memberikan efek jera secara langsung.

Meskipun demikian, adanya kebolehan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kasus *khalwat* secara adat merupakan bagian dari substansi Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini merujuk kepada Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, yang mengatur tentang pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat. Pasal 10 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 mengharuskan setiap aparat yang bertugas di Aceh untuk memahami dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat Aceh. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh sangat penting dalam penyelesaian masalah sosial, termasuk kasus *khalwat*.

Qanun No. 9 Tahun 2008 menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat dalam pelaksanaan pemerintahan dan tugas aparatur negara di Aceh. Pasal (2) dan (3) Qanun ini menyatakan bahwa setiap aparat yang bertugas di Aceh harus memahami dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga harmoni antara sistem pemerintahan dengan nilai-nilai budaya dan sosial yang berkembang di masyarakat Aceh.

Adat istiadat Aceh memiliki kedudukan penting sebagai identitas sosial dan budaya.¹⁸ Penghargaan terhadap adat ini bukan hanya mencakup penghormatan terhadap tradisi yang telah lama ada, tetapi juga mengharuskan aparat negara untuk beradaptasi dengan cara penyelesaian masalah dan interaksi sosial yang berlaku di masyarakat, agar tidak terjadi ketegangan antara norma formal dan norma sosial. Kewajiban aparat untuk memahami dan menghargai adat istiadat ini juga mengandung pengertian bahwa para pejabat tidak hanya berfungsi sebagai penguasa yang menjalankan peraturan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat Aceh yang menjaga nilai-nilai luhur dalam adat.

Pasal (3) dari Qanun No. 9 Tahun 2008 menegaskan bahwa tidak hanya aparat pemerintah pusat, tetapi juga pejabat di tingkat Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota harus memahami, membina, dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat masyarakat setempat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap adat istiadat bukan hanya tugas individu aparat, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif dari semua tingkat pemerintahan yang ada di Aceh. Pemerintah Aceh, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan di daerah, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tatanan adat dan adat istiadat tetap terjaga dalam kebijakan dan program pembangunan.

Selanjutnya, dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Pasal 13 menyebutkan beberapa jenis perselisihan yang dapat diselesaikan dengan cara adat. Salah satunya adalah perselisihan terkait *khalwat*. Dalam konteks ini, penyelesaian kasus *khalwat* secara adat di Desa Seumadam sudah sesuai dengan ketentuan dalam qanun. Penyelesaian sengketa adat ini mencerminkan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam

¹⁸ Muhibuddin Usman, "Tradisi Dan Budaya Islam Di Aceh: Pengaruh Dan Praktik Dalam Konteks Sosial | Carita: Jurnal Sejarah Dan Budaya," *Carita: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 3, no. 1 (November 30, 2024): 56–76, <https://doi.org/DOI: 10.35905/carita.v3i1.10666>.

penyelesaian masalah sosial, yang lebih menekankan pada penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi.

Pasal 13 ayat (2) dan (3) dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa adat harus dilakukan secara bertahap. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme bertahap ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara lokal dengan pendekatan berbasis kearifan lokal. Pada tahap pertama, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah atau pertemuan adat yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa. Tujuan utamanya adalah meredakan ketegangan dan menjaga hubungan sosial yang baik di masyarakat.

Jika penyelesaian pada tahap pertama tidak berhasil, proses sengketa akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yang melibatkan aparat pemerintah atau peradilan formal. Mekanisme bertahap ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Aceh karena mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara lokal sesuai dengan nilai-nilai adat tanpa harus terjebak dalam prosedur hukum formal yang rumit dan memakan waktu.

Pasal (3) lebih lanjut mengatur peran aparat penegak hukum dalam memberi kesempatan bagi penyelesaian sengketa adat terlebih dahulu di tingkat gampong. Ketentuan ini memberikan ruang bagi masyarakat dan lembaga adat untuk menyelesaikan masalah secara internal tanpa langsung melibatkan sistem hukum formal. Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk memberikan kesempatan ini, yang pada gilirannya memperkuat keberadaan sistem penyelesaian sengketa adat di Aceh.

Kritik terhadap Penyelesaian Adat

Penyelesaian kasus jarimah khalwat melalui mekanisme adat merupakan praktik yang lazim dijalankan di beberapa wilayah di Aceh, termasuk Desa Seumadam di Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan ini mengedepankan musyawarah bersama antara perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, dengan tujuan utama menjaga harmoni sosial dan memberikan efek jera kepada pelaku. Keputusan yang diambil biasanya berupa sanksi adat yang fleksibel dan kontekstual, seperti permintaan maaf terbuka, denda, hingga pernikahan paksa. Adat dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai penyangga nilai-nilai kolektif yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan penyelesaian adat mendapatkan legitimasi formal dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam qanun tersebut diatur bahwa sebelum suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme hukum formal, masyarakat diberi ruang untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara adat. Hal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum plural yang hidup di Aceh, sekaligus menegaskan kedudukan adat sebagai sarana menjaga norma-norma sosial dan keagamaan. Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan adat ini menyisakan sejumlah kritik yang perlu dicermati, terutama dalam hal efektivitas, keadilan, dan potensi penyalahgunaannya.

Dalam konteks perbedaan antara jarimah khalwat dan zina, penyelesaian kasus secara adat sering kali muncul dari kesalahpahaman masyarakat dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran. Khalwat dipahami sebagai tindakan menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat tertutup, yang berpotensi menuju zina, namun belum memenuhi unsur perzinahan secara syar'i. Dalam satu kasus di Desa Seumadam, masyarakat sempat mengira telah terjadi zina, tetapi setelah tidak ditemukan bukti fisik, kasus tersebut dikategorikan sebagai khalwat. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menilai kasus agar tidak terjadi kriminalisasi atau stigmatisasi berlebihan terhadap individu, terutama perempuan.

Meskipun diakui oleh qanun, mekanisme penyelesaian adat dalam kasus khalwat di Desa Seumadam kerap dianggap terlalu ringan. Hukuman seperti ganti rugi, permintaan maaf, atau pernikahan cenderung tidak sebanding dengan ancaman sanksi dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, yang dapat berupa cambuk hingga 10 kali, denda emas hingga 100 gram, atau penjara hingga 10 bulan. Ringannya sanksi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kasus serupa terulang. Bahkan, penyelesaian secara adat ini kerap dimanfaatkan sebagai "jalan pintas" oleh sebagian pihak yang ingin menikah tanpa mengikuti prosedur resmi dan restu keluarga, cukup dengan berpura-pura melakukan khalwat dan menyelesaikannya dengan pernikahan adat.

Pada sisi lain, penerapan pernikahan sebagai sanksi adat juga menimbulkan dilema serius, terutama dalam aspek keadilan gender. Perempuan, dalam banyak kasus, menjadi pihak yang paling dirugikan secara sosial dan psikologis. Mereka cenderung terpaksa menerima pernikahan demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari stigma lebih jauh, meskipun secara pribadi belum siap secara mental atau fisik. Hal ini mencerminkan ketimpangan posisi tawar perempuan dalam mekanisme penyelesaian adat dan potensi pelanggaran ketidakadilan berbasis gender. Ketimpangan lainnya tampak dari penerapan sanksi berbasis denda. Dalam sistem adat yang berlaku, pelaku dengan kondisi ekonomi baik dapat menyelesaikan kasus dengan membayar ganti rugi tanpa mengalami dampak sosial yang berarti.

Sebaliknya, bagi pelaku dari kalangan ekonomi lemah, beban denda menjadi tekanan tambahan yang mempersulit mereka secara ekonomi maupun sosial. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa mekanisme adat rentan menciptakan ketidakadilan sosial dalam penegakan norma, karena tidak mempertimbangkan secara proporsional kemampuan ekonomi dan latar belakang sosial pelaku. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan terhadap penerapan hukum adat juga menjadi celah yang memperbesar potensi penyalahgunaan. Tidak adanya standar baku dalam menentukan sanksi membuat proses musyawarah adat sangat dipengaruhi oleh subjektivitas tokoh-tokoh yang terlibat. Dalam beberapa kasus, keputusan adat dapat dipengaruhi oleh tekanan keluarga pelaku atau kepentingan kelompok tertentu, sehingga keadilan substantif menjadi terabaikan. Hal ini menurunkan kredibilitas hukum adat dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian tersebut.

Dari sisi efek jera, mekanisme adat yang terlalu lunak dinilai tidak mampu mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari. Ketika pelaku hanya

dikenakan sanksi ringan tanpa mengalami rasa malu, takut, atau penyesalan mendalam, maka potensi untuk mengulangi perbuatan tersebut tetap tinggi. Bahkan, masyarakat sekitar yang menyaksikan kasus tersebut bisa jadi melihat adanya celah dalam sistem hukum yang dapat dimanfaatkan, alih-alih menjadikannya pelajaran untuk menjauhi pelanggaran serupa. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, sanksi yang diterapkan di Desa Seumadam mencakup aspek finansial, sosial, dan simbolik. Dalam salah satu kasus, pelaku laki-laki diminta membayar ganti rugi sebesar Rp17 juta kepada suami dari perempuan yang terlibat khalwat. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian bermaterai sebagai bukti bahwa kasus telah diselesaikan secara damai. Meski demikian, penyelesaian berbasis uang seperti ini tidak mencerminkan bentuk pemulihan yang komprehensif bagi korban atau pihak yang dirugikan secara emosional.

Selain itu, pengusiran dari kampung menjadi salah satu bentuk sanksi sosial paling berat, terutama terhadap perempuan yang terlibat dalam khalwat. Pengusiran ini berdampak luas, seperti hilangnya tempat tinggal, jaringan sosial, dan stigma berkelanjutan yang melekat pada individu bersangkutan. Sanksi ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum adat bermaksud menjaga keharmonisan sosial, praktiknya dapat berujung pada marginalisasi dan pelanggaran hak-hak dasar. Dalam beberapa kasus lainnya, penyelesaian dilakukan melalui pernikahan paksa, terutama pada remaja. Meskipun dianggap sebagai solusi untuk memulihkan nama baik keluarga, pernikahan dalam kondisi terpaksa jelas menimbulkan dampak psikologis dan legal yang serius. Tidak jarang, pernikahan ini berujung pada perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakbahagiaan berkepanjangan akibat keputusan yang diambil di bawah tekanan sosial.

Ada pula usulan dari masyarakat agar sanksi adat dijalankan dalam bentuk kontribusi sosial, seperti menyumbangkan material untuk pembangunan desa. Sayangnya, usulan ini belum menjadi prioritas dalam praktik penyelesaian kasus. Dalam realitasnya, sanksi finansial dan pernikahan masih menjadi pola utama, yang tidak selalu menjawab persoalan keadilan dan efek jera. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelesaian adat terhadap kasus khalwat di Desa Seumadam memiliki keunggulan dalam hal pelestarian nilai-nilai lokal dan solusi cepat berbasis konsensus. Namun, di sisi lain, kritik terhadap mekanisme ini tidak dapat diabaikan, terutama dalam aspek efektivitas hukum, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap perempuan. Tanpa adanya reformasi dan pengawasan yang ketat, mekanisme adat justru berisiko melanggengkan ketimpangan, penyalahgunaan, dan melemahnya norma hukum yang lebih substansial.

Kesimpulan

Penyelesaian *jarimah khalwat* di Desa Seumadam dilakukan melalui mekanisme adat yang menitikberatkan pada musyawarah dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh agama, dan keluarga pelaku, dengan tujuan untuk menghindari konflik yang lebih besar. Sanksi yang diberikan seperti ganti rugi, permintaan maaf terbuka, atau tindakan lainnya yang sesuai dengan norma adat setempat. Pendekatan adat ini lebih disukai oleh masyarakat karena dinilai cepat, bijaksana, dan menjaga

nama baik keluarga pelaku maupun korban. Dalam beberapa kasus, jika penyelesaian adat tidak tercapai, kasus tersebut dapat dibawa ke Mahkamah Syariah untuk diproses secara hukum formal.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang mengatur sanksi terhadap *jarimah khalwat*, berupa hukuman cambuk, denda, atau penjara. Namun, qanun ini juga mengakui peran penting penyelesaian adat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Penyelesaian secara adat di Desa Seumadam sejalan dengan ketentuan qanun, karena mengutamakan musyawarah dan sanksi yang berbasis adat sebelum melibatkan hukum formal. Namun demikian, penerapan hukum adat dalam kasus *khalwat* di Desa Seumadam kurang memberikan efek jera, berpotensi disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk menikah murah, cenderung merugikan perempuan dan menciptakan ketidakadilan sosial

Referensi

- Afriani, Maulida, and Muhammad Nur Muhammad Nur. "Penerapan Sanksi Adat terhadap Perkara Khalwat di Tingkat Gampong (Studi Penelitian di Blang Pulo Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19253>.
- Andini, Zahra Dwi, and Usiono Usiono. "Systematic Literature Review: Pembudayaan Pancasila Di Kalangan Masyarakat." *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (December 1, 2023): 623–28. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1412>.
- Arifin, Muhammad. "Tindak Pidana Terhadap Pelaku Khalwat Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 14 Tahun 2003." *Jurnal Al-Fikrah* 4, no. 1 (June 30, 2015): 6–36.
- Dewi, Satiya Citra, and Hasanuddin Yusuf Adan. "The Effectiveness of Adat Sanction for Khalwat Offense Based on Islamic Criminal Law in Ketol, Central Aceh [Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat: Perspektif Hukum Pidana Islam di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (December 26, 2021): 217–37. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11341>.
- Halib, Mohammad Abdul Al, and Lina Pusvisasari. "Harmony of Islam and Local Traditions in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Era of Modernization." *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization* 1, no. 1 (April 2, 2025): 20–28. <https://doi.org/10.61166/alwadhih.v1i1.4>.
- Hayati, Lisa, Husamuddin Mz, and Sumardi Efendi. "Sanksi Adat Terhadap Jarimah Khalwat Perspektif Fikih Jinayah: Studi Di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (June 28, 2024): 151–65. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.107>.
- Hendra, Hardi Syah, and Nina Nursari. "Pemberlakuan Hukuman Cambuk Dalam Konsep Pidana Sebagai Bagian Dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2024): 47–61. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.817>.

- Hoesin, Moehammad. *Adat Atjeh*. 1st ed. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 2014.
- Irfan, Irfan. "Khalwat Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 21, 2020): 112–21. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14293>.
- Khalib, Abdul, and Mukhlis Mukhlis. "Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 1 (February 17, 2020): 1–16.
- Khalidi, Muhadi, and Arifin Abdullah. "Dayah dan Rehabilitasi Akhlak Pelaku Jarimah: Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (August 16, 2022): 65–77. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.12762>.
- Mustafa, Bukhari, Bastiar, Sumiadi, and Husni. "Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat Di Aceh Tamiang." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (January 9, 2023): 52–64.
- Rasimin, Rasimin, Syakila Finanjani, Yolanda Yolanda, Septiana Amanda Faradila, and Nurul Husna. "Literature Review: Mengimplementasikan Nilai-Nilai Seloko Adat Kota Jambi Pada Proses Konseling." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (June 12, 2023): 10451–60.
- Sari, Desy Purwita, Rofikah Rofikah, and Luthfiyah Trini Hastuti. "Denda Emas Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 6, no. 2 (April 22, 2021): 1–25. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v6i2.50526>.
- Surya, Achmad, and Suhartini Suhartini. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (April 24, 2019): 91–112. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5>.
- Usman, Muhibuddin. "Tradisi Dan Budaya Islam Di Aceh: Pengaruh Dan Praktik Dalam Konteks Sosial | Carita: Jurnal Sejarah Dan Budaya." *Carita: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 3, no. 1 (November 30, 2024): 56–76. <https://doi.org/DOI: 10.35905/carita.v3i1.10666>.
- Usqo, Hanafi Urwatil, and Mhd Yadi Harahap. "Penyelesaian Sengketa Khalwat Melalui Non Litigasi (Studi Analisis Desa Teupi Resip Lhokseumawe Aceh)." *Jurnal Dunia Pendidikan* 5, no. 2 (October 31, 2024): 466–81. <https://doi.org/10.55081/jurdip.v5i2.3121>.